

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bohari, *Pengantar Hukum Retribusi*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Davey K..J, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1998.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat Jakarta, 2016.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunandi, *Retribusi Daerah*, Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta 1997.
- Hari Karyono, *Kepariwisata*, PT Grasindo, Jakarta, 1997.
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta, Grasindo, 2011.
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit, NUANSA, Bandung, 2010.
- Kurniawan Panca dan Purwanto Agus, *Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Banyumedia Publishing. 2004.
- Koswara, E., *Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pariba, 2001.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2014.
- Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang, Banyumedia Publishing, 2004.

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Grasindo, 2007.

Sedarmayanti, *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2018.

Untung Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Jawa Barat, 2015.

**Jurnal:**

Ahmad Surkati, “Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkat Kerjasama Antar Daerah”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan MIMBAR*, volume XXVII, No. 1, Tahun 2012.

Andi Maya Purnamasari, “Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume XXII, No.1, Tahun 2011.

Beta Asteria “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah”, *Jurnal Riset Manajemen*, II (Januari, 2015),

Deddy Prasetya Maha Rani, “Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur”, *Jurnal Politik Muda*, Volume III, No. 3, Tahun 2014.

Hellin dan Soemanto, “Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar”, *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Volume 32, No. 1, Tahun 2017.

Joko Mariyanto, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD”, *Jurnal Akutansi dan Sistem Teknologi*, Volume 11, No. 1 Tahun 2015.

Kadar Pamuji, “Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume XIV, No. 3, Tahun 2014.

Ni Luh Gde Ana Pertiwi, “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar”, *Jurnal*

*Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Volume 3, No. 3, Tahun 2014.

Novi Yanti, Rizka Hadya, “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kota Padang”, *Jurnal Benefita*, Volume 3, No. 3, Tahun 2018.

Machwal Huda, “Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Politika*, Volume I, No. 1, Tahun 2015.

Rieka Sri Rizki Asti Kartini, “Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Bandung”, *Tourism Scientifie Journal*, Volume 4, No. 1, Tahun 2018.

Safirta, “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura”, *Jurnal Future*, Volume 3, No. 1 Tahun 2012.

Sunarto dan Reni Dyah Ayu Nur Fatimah, “Pengaruh Penerimaan Retribusi dan Penetapan Tarif Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah KAbupaten Gunungkidul Tahun 2013-2015”, *Jurnal Akuntansi*, Volume IV, No. 2, Tahun 2016.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 dan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Pengembangan Pariwisata.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.

Peraturan Darah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.